

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsinya secara tidak langsung turut serta untuk menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman Kota Yogyakarta. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K). Melalui konsep ini, diharapkan permukiman mundur atau tidak berada di sempadan sungai, munggah melalui konsep rumah susun dan menghadap sungai sehingga menciptakan kawasan permukiman yang bersih, nyaman, dan layak huni.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsinya menghadapi kendala Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya dilingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsinya memberikan solusi atas kendala

yang dihadapi dengan melakukan sosialisasi dan membangun Kerjasama dengan berbagai elemen Masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran dan mengurangi sampah rumah tangga. Selain itu Dinas PUPKP mendapat bantuan anggaran dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN untuk membangun mengelola permukiman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam menjaga kualitas lingkungan kawasan permukiman Kota Yogyakarta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman masih perlu melakukan evaluasi terkait koordinasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat memaksimalkan pembangunan ruang sanitasi dan menghilangkan kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Terhadap Masyarakat juga dihimbau untuk dapat bekerja sama dan menjaga kebersihan lingkungan kawasan permukiman kumuh yang sudah dibangun ruang sanitasi agar kawasan permukiman menjadi tempat yang bersih, nyaman, dan layak huni.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agus Dwiyanto, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaboratif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agus Maryono, 2016, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Agus S. Sadana, 2014, *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Emilda Pransiska dan Fitria Rizkiana, 2024, *Pencemaran Lingkungan Berbasis Nilai-Nilai Keislaman*, Mitra Cendekia Media, Sumatra Barat.
- Hartono, 2009, *Geografi Jelajah Bumi Dan Alam Semesta Kelas XI*, Citra Praya, Jakarta.
- Hyronimus Rhity, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap; dari klasik sampai postmodernisme*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jatna Supriyatna, 2021, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Rachmat Mulyana, 2013, *Merancang Pemukiman Sehat dan Berwawasan Lingkungan*, Unimed Press, Medan.
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.

### Jurnal:

- Ahmad Dzaki,dkk, 2024, “*Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*”, *Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume. 1, Universitas Pakuan.

Alfian Mardiansyah, “*Analisis Yuridis Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 17, Universitas Sriwijaya.

Bagas Bayu Rahman, 2020, “*Kualitas Lingkungan Permukiman di Kelurahan Miroto Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang*”, *Jurnal Geo Image*, Vol. 2, Unnes.

H.Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko, 2016, “*Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Mimbar Hukum*, Vol.28, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Lutfi Muta’ali dan Arif Rahman Nugroho, “*Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Made Widiadnyana, 2018, “*Analisis Komparatif Peran Adat dan Kepercayaan dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkaca Pada Adat yang Ada di Permukiman Tradisional*”, *Jurnal Presipitasi*, Vol.15, Denpasar.

Tibian Emmanuel Gallant Sadenna,dkk, 2022, “*Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Lingkungan*”, Binus University, Jakarta.

### **Skripsi:**

Hendo Hernawan Putra, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan terhadap Restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Robinson Manullang, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rencana Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai akibat dari pembangunan tol Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yurizatul Fadilah, 2024, *Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan di Kabupaten Solok Selatan*, Skripsi, Universitas Bung Hatta Padang.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2023. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36. Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Berita Daerah Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016. Yogyakarta.

### **Internet :**

Albarsyah, Kawasan Kumuh Tepi Sungai Gajahwong Jadi Destinasi Wisata Baru, <https://www.topbusiness.id/60183/kawasan-kumuh-tepi-sungai-gajah-wong-jadi-destinasi-wisata-baru.html>, diakses 2 Februari 2025.

Ardi Teristi, Pemerintah Kota Tata Kawasan Kumuh di Yogyakarta,

<https://mediaindonesia.com/nusantara/464709/pemerintah-kota-tata-kawasan-kumuh-di-yogyakarta>, diakses 5 Februari 2025.

Aryo Sumbogo, Wajah Baru Kawasan Tepi Sungai Gajahwong: Dulu Kumuh,

Kini Jadi Spot Wisata Yogyakarta,

<https://www.kompas.tv/regional/261032/wajah-baru-kawasan-tepi-sungai-gajah-wong-dulu-kumuh-kini-jadi-spot-wisata-yogyakarta>, diakses 4 Februari 2025.

Eka Arifa Rusqiyati, Penataan Kawasan kumuh Sungai Gajahwong sasar tiga

kelurahan, <https://jogja.antaranews.com/berita/371501/penataan-kawasan-kumuh-sungai-gajah-wong-sasar-tiga-kelurahan>, diakses 4 Februari 2025.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Struktur

Organisasi, <https://pu.jogjakota.go.id/page/index/struktur-organisasi>, diakses 5 Februari 2025.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Visi Misi,

<https://pu.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi>, diakses 5 Februari 2025.

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, Bank Dunia Apresiasi Penataan

Kawasan Kumuh Sungai Gajahwong,

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/23708>, diakses 4 Februari 2025.



### Lampiran



Ibu Karina Wiwin Sunariasih, S.T dan Ibu Ernita Sari Purwaningtias, S.Ars  
STAF BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN